

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Harbani Pasolong, Administrasi Publik adalah bentuk kerja sama melibatkan dua orang atau lebih dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, bertujuan memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien (Harbani Pasolong, 2010). Salah satu usaha untuk menciptakan efisiensi dan keefektivan yaitu dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah, terjadi perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Pentingnya fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.

Dalam konteks keamanan, pemerintah diwajibkan memberikan perasaan aman kepada masyarakat sebagai salah satu aspek dari layanan publik yang mereka sediakan. Fungsi ini mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang pada dasarnya kejahatan merujuk pada tindakan yang merugikan individu atau merusak tatanan sosial. Kejahatan dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari pencurian, perusakan, penipuan, hingga tindakan teror. Kehadiran kejahatan ini memerlukan kewaspadaan karena potensinya untuk memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan.

Bandung, sebagai salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, menarik perhatian sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan pekerjaan bagi banyak orang. Fenomena ini dapat diatributkan pada keberagaman tempat wisata, lembaga pendidikan, dan perusahaan yang berlimpah di kota tersebut. Sejumlah tempat wisata, perguruan tinggi, dan perusahaan di Bandung bahkan dikenal sebagai

destinasi terkenal di seluruh Indonesia. Kota ini menyajikan berbagai daya tarik, seperti kawasan Dago yang terkenal sebagai pusat wisata, sementara kampus-kampus dan perusahaan terkenal tersebar luas di seluruh wilayah Bandung. Meskipun demikian, potensi semua hal tersebut dapat mengalami ketidakberdayaan jika keamanan kota Bandung tidak dijaga dengan cermat.

Pada tahun 2022, Kota Bandung mengalami peningkatan angka kejahatan yang melibatkan berbagai jenis pelanggaran. Bahkan, dalam tahun tersebut, terjadi kejadian serius berupa aksi teror bom di kota Bandung (Wamad, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian penting mengingat kota Bandung merupakan destinasi yang banyak diminati untuk kunjungan bahkan tempat tinggal. Kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena sosial manusia yang kompleks, dan seringkali sulit dipahami akar penyebabnya karena kurangnya pemahaman proporsi secara dimensi. Perkembangan kualitas dan kuantitas kriminalitas, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, bersifat relatif dan saling terkait dalam faktor penyebabnya. Pelaku kejahatan dapat dianggap sebagai individu yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Berikut ini adalah data kejahatan yang tercatat di Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2022.

Gambar 1.1 Jumlah Kejahatan di Kota Bandung 2018-2022



Dalam Ribuan

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Dari grafik tersebut terlihat bahwa angka kejahatan di Kota Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2022, meskipun terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Selain itu, dari tahun 2018 hingga 2020, tercatat penurunan terus menerus dalam tingkat kejahatan di kota Bandung. Peningkatan tingkat kejahatan pada tahun 2022 menjadi pemicu bagi pemerintah kota Bandung untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan agar keamanan di kota tersebut tetap terjaga.

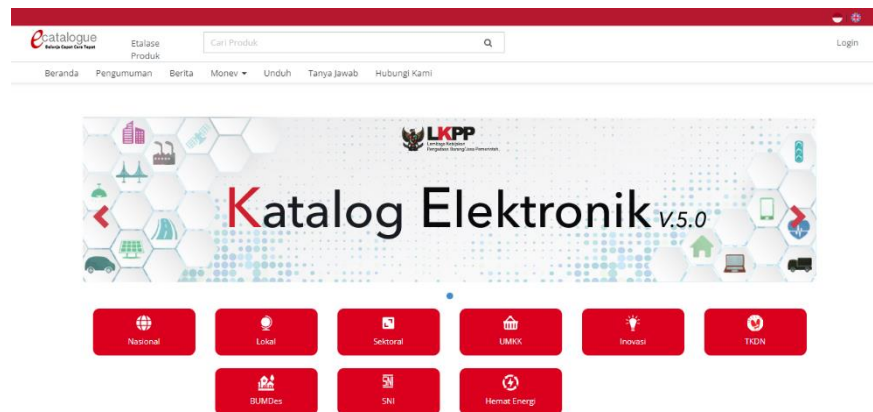
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kota Bandung perlu mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor, terutama yang berpotensi memengaruhi atau mengatasi isu keamanan. Tujuan dari percepatan pembangunan ini adalah agar diharapkan dapat mengurangi tingkat kriminalitas dan kejahatan di kota Bandung. Langkah ini diambil karena pembangunan memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dari berbagai aspek, dan kedua, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang waktu, serta berkembang sesuai dengan konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

Kota Bandung sebenarnya telah dilengkapi dengan sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di beberapa ruas jalan yang terkenal. Program pengadaan CCTV ini telah dijalankan dalam waktu yang cukup lama, bahkan pada tahun 2013, Kota Bandung telah mengalokasikan dana yang besar untuk mewujudkan program tersebut. Hingga tahun 2022, sudah terpasang sekitar 327 CCTV di berbagai tempat di Kota Bandung yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, yang bahkan dapat diakses secara terbatas oleh masyarakat umum. CCTV yang terpasang tidak semuanya dapat berfungsi sebagaimana mestinya diantaranya ada yang dapat tersambung bahkan ada juga yang tidak aktif atau tidak tersambung yang dapat terjadi akibat banyak hal dan kamera berstatus tidak aktif dimana hal tersebut berbeda dengan tidak tersambung kondisi tidak aktif adalah kondisi dimana cctv tersebut tidak hanya tidak tersambung akan tetapi mengalami kerusakan dan harus diperbaiki atau diganti. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

pada tahun 2022, disebutkan bahwa jumlah ideal CCTV untuk pengawasan Kota Bandung seharusnya mencapai 1.500 unit (Muhammad, 2022). Pengadaan cctv pada tahun 2023 dilakukan oleh pihak DISKOMINFO kota Bandung dengan cara bekerja sama dengan pihak penyedia. Pemilihan Perusahaan penyedia tersebut dilakukan melalui e-katalog

Gambar 1.2

E-katalog



Sumber: e-katalog 5.0

e-katalog adalah aplikasi belanja online untuk membantu pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dikembangkan oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan e-katalog menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan pemerintah. Tujuan dari e-katalog adalah untuk menunjang proses pengadaan barang ataupun jasa untuk pemerintah agar selaras dengan perkembangan zaman. Sistem e-katalog juga mendorong organisasi pemerintah agar dapat bertransformasi, yaitu memotong rantai birokrasi, mempermudah prosedur, serta melakukan perubahan pada proses pengadaan barang dan jasa.

Meskipun kenyataannya, pada tahun 2022 Kota Bandung belum mencapai target jumlah CCTV sebanyak 1500, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dalam tingkat kejahatan. Awalnya, jumlah kejahatan di Kota Bandung mencapai lebih dari 3000, namun mengalami penurunan menjadi sekitar 2000 pada tahun 2021. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali dalam tingkat kejahatan. Bahkan,

bukan hanya kejahatan konvensional, tetapi juga tercatat adanya aksi teror pada tahun tersebut.

Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mencari efektivitas pengadaan cctv yang dipasang di banyak titik di kota Bandung, dengan begitu peneliti ingin meneliti penelitian dengan judul

EFEKTIFITAS PENGADAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*
DALAM MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA
BANDUNG

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat peneliti rumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

(Efektivitas, Makmur 2015)

- Ketepatan Perhitungan Pembiayaan
Bagaimana pembiayaan untuk pengadaan cctv yang dilakukan oleh pihak DISKOMINFO kota Bandung tahun 2023?
- Ketepatan Waktu
Bagaimana ketepatan penetapan waktu dalam pengadaan cctv oleh DISKOMINFO kota Bandung tahun 2023?
- Ketepatan Berfikir
Bagaimana pihak DISKOMINFO kota Bandung mengatasi kendala yang muncul selama proses pengadaan cctv?
- Ketepatan Dalam Pengukuran
Bagaimana pihak DISKOMINFO kota Bandung memilih titik pemasangan cctv di kota Bandung pada tahun 2023?
- Ketepatan Menentukan Pilihan
Apa saja syarat spesifikasi untuk cctv yang dipasang oleh DISKOMINFO kota Bandung pada tahun 2023?
- Ketepatan Menjalankan Perintah
Bagaimana perintah yang diberikan oleh kepala dinas DISKOMINFO kota Bandung terkait pemasangan cctv tahun 2023?

- Ketepatan Menentukan Tujuan
Apa tujuan jangka panjang dari program pengadaan cctv tahun 2023 oleh DISKOMINFO kota Bandung?
- Ketepatan Sasaran
Apa tujuan jangka pendek dari program pengadaan cctv tahun 2023 oleh DISKOMINFO kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti sebutkan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

(Efektivitas, Makmur 2015)

- Ketepatan Perhitungan Pembiayaan
Mengetahui anggaran yang dianggarkan untuk pengadaan cctv di kota Bandung tahun 2023
- Ketepatan Menetapkan Waktu
Mengetahui ketepatan waktu proses pengadaan cctv di kota Bandung pada tahun 2023
- Ketepatan Berfikir
Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengadaan cctv pada tahun 2023 di kota Bandung
- Ketepatan Menentukan Pilihan
Mengetahui spesifikasi cctv yang digunakan dalam program pengadaan cctv oleh pihak DISKOMINFO kota Bandung pada tahun 2023
- Ketepatan Menjalankan Perintah
Mengetahui perintah yang diberikan oleh kepala dinas DISKOMINFO kota Bandung terkait pengadaan cctv tahun 2023
- Ketepatan Dalam Pengukuran
Mengetahui cara pihak DISKOMINFO kota Bandung dalam menentukan pilihan titik pemasangan cctv pada tahun 2023
- Ketepatan Menetapkan Tujuan

Mengetahui tujuan jangka panjang dalam program pengadaan cctv pada tahun 2023 oleh DISKOMINFO kota Bandung

- Ketepatan Sasaran

Mengetahui tujuan jangka pendek dalam program pengadaan cctv pada tahun 2023 oleh DISKOMINFO kota Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat penelitian yaitu:

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam kajian administrasi publik

- Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk pihak-pihak terkait guna mengevaluasi program untuk mengurangi tingkat kejahatan di kota Bandung.

1.5 Kerangka Berpikir

Pemerintah dalam kehidupan bernegara memiliki empat fungsi penting yaitu pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pemenuhan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya administrasi publik menurut pasolong adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugas pemerintahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif.

Pelayanan yang dimaksud dalam salah satu fungsi pemerintah tidak hanya meliputi izin dan surat menyurat saja akan tetapi hal tersebut juga meliputi pemberian rasa aman terhadap publik, pemberian rasa aman tersebut dapat berupa hukum ataupun tindakan untuk mencegahnya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum dapat berlaku apabila telah terjadi sebuah pelanggaran akan tetapi pemerintah dituntut untuk melakukan pencegahan.

Pada peraturan pemerintah no 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah/negara yaitu meliputi penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahan barang milik negara/daerah, pemerintah diperbolehkan memanfaatkan barang milik negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020, 2020). hal tersebut tercermin dengan pemanfaatan salah satu barang milik daerah di kota bandung yaitu cctv yaitu untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di kota bandung.

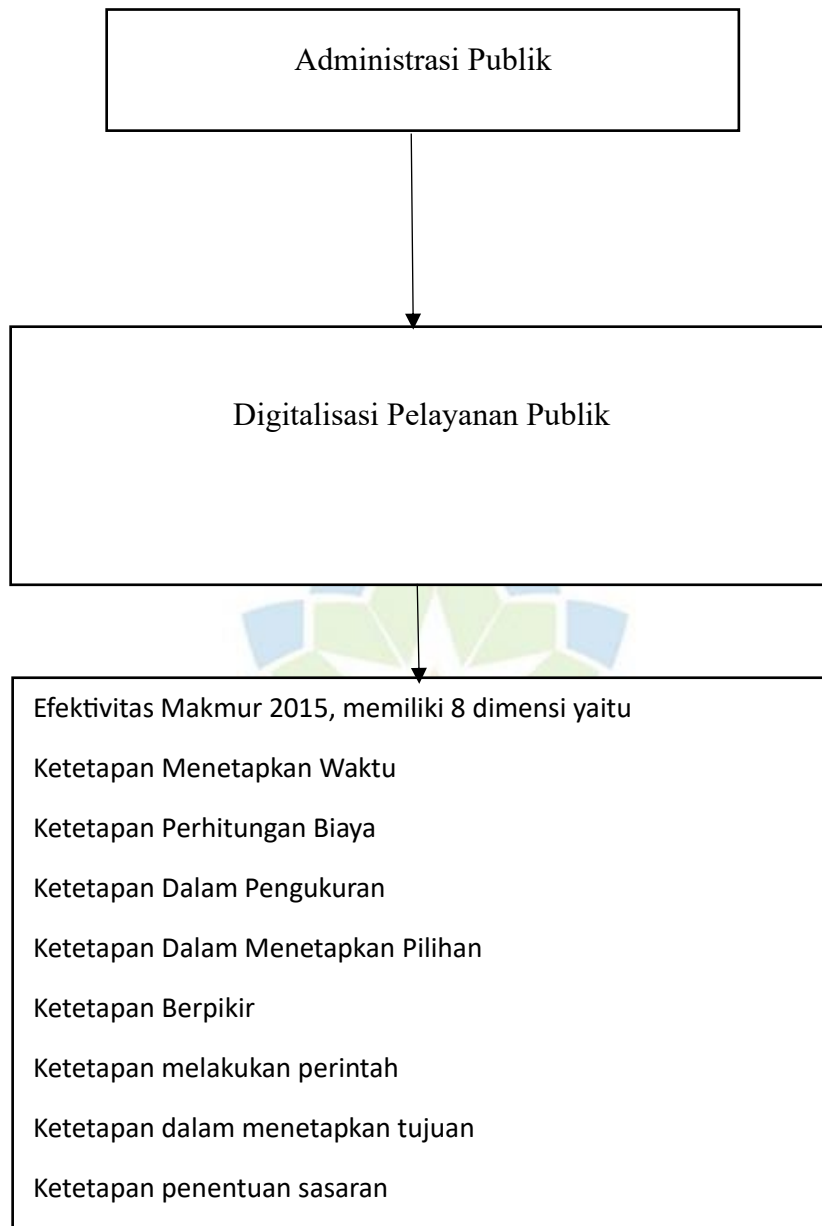
Pada tahun 2022 jumlah tindakan kejahatan yang telah terjadi di kota Bandung tercatat lebih dari 2.000 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Pemerintah kota Bandung sebenarnya telah memasang banyak memasang cctv di kota Bandung yang jumlahnya hingga tahun 2022 telah mencapai lebih dari 200 cctv yang terpasang beberapa titik di kota Bandung. namun pada tahun 2022 justru angka kejahatan di kota Bandung tercatat telah naik dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya mengurangi tingkat kejahatan atau kriminalitas di kota bandung menggunakan cctv, perlu adanya pengukuran keefektifitasan hal tersebut. Salah satu yang dapat mengukur efektifitas tersebut dengan menggunakan teori dari efektifitas yang salah satunya berasal dari seorang ahli yaitu teori efektifitas dari Makmur tahun 2015, yang memaparkan terdapat 8 dimensi untuk mengukur efektivitas.

Dengan digunakannya teori tersebut diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi dalam melaksanakan pengadaan cctv di kota bandung yang merupakan salah satu sarana untuk mengurangi tingkat kriminalitas di kota Bandung.

Kerangka berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat berdasarkan acuan dan keterkaitan teori dengan penelitian- penelitian terdahulu. Adapun penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengadaan cctv dalam mengurangi tingkat kriminalitas di Kota Bandung”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengadaan

cctv di kota Bandung. Penelitian- penelitian terdahulu dibahwa ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang peneliti bahas. Perbedaan tersebut terdapat pada lokus dan focus penelitian. Pada penelitian ini Peneliti melakukan penelitian di Kota Bandung. Pengambilan dari penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan referensi serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil	Kesamaan	Perbedaan
Darmada, Kadek, Dewa (2022)	Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB)	Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk tahun anggaran 2022, sudah dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan pengadaan barang/jasa	Penelitian yang dilakukan darmada mengenai pengadaan IT	Focus pada penelitian adalah efektivitas pengadaan cctv sedangkan pada penelitian darmada focus penelitiannya tidak hanya pada pengadaan tapi pada kesesuaian dalam tingkat komponen

		sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.		dalam negeri pada barang yang dilakukan pengadaan
Murtinah, Sri, Tintin (2022)	PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI UNIT LAYANAN PENGADAAN BIRO UMUM, SEKRETARIAT PRESIDEN	Pada penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Unit Layanan Pengadaan Biro Umum tahun 2021 berdasarkan aspek kualitas dan kuantitas serta aspek waktu sudah	Penelitian ini membahas mengenai pengadaan oleh pemerintah pusat	Focus pada penelitian adalah pengadaan cctv yang dilakukan oleh DISKOMINFO kota Bandung sedangkan penelitian yang dilakukan Murtina tahun 2022 berfokus pada pengadaan barang oleh pemerintah pusat

		sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.		
Riska Batubara, Riski Mardiansyah, Ahmas Sukma A.M (2022)	EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN BANTUAN SOSIAL PANGAN NONTUNAI (BPNT) DI KECAMATAN MAJALENGKA KABUPATEN	Pada penelitian ini ditemukan bahwa Pengadaan tempat sampah juga membantu masyarakat dalam memilah sampah-	Penelitian ini berfokus pada pengadaan barang oleh pemerintah	Penelitian ini berfokus pada efektivitas pengadaan cctv sedangkan pada penelitian risiko, riski, dan ahmas berfokus pada

	N MAJALENG KA TAHUN 2021	sampah yang akan dibuang oleh masyarakat kelurahan ini.		pengadaan tempat sampah oleh pihak kelurahan.
--	-----------------------------------	---	--	---

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

